

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat¹. Dalam Peraturan Walikota Medan nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peraturan walikota ini mengatur kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 5 pada ayat (1) meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/ atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Program pemberdayaan Masyarakat disini yang saya bahas ialah tentang pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya²

¹ Dwi Pratiwi Kurniati, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi(Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)". Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4, Hal 9-14

² Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu dapat mendorong memberikan bantuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, untuk peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan program di bidang ekonomi dan keterampilan pada masyarakat.

Salah satu dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini berupa melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM di kelurahan, dengan mengikutsertakan masyarakat yang ada di wilayah lingkungan kelurahan tersebut. Salah satu kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu kelurahan Titi Rantai. Kelurahan Titi Rantai telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini, khususnya pada kegiatan pelatihan usaha dan pengembangan UMKM yang ada di lingkungan kelurahannya.

Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, situasi/kondisi yang terjadi saat ini yaitu masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Hal ini disebabkan masyarakat yang tidak memiliki keterampilan untuk memulai suatu usaha, dan minimnya lapangan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha di kelurahan terhadap masyarakat memiliki dampak salah satunya upaya dalam pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan. Hal ini disebabkan karena dengan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Saat ini kebutuhan pelatihan di masyarakat sangat penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas masyarakat.

Kelurahan Titi Rantai melaksanakan kegiatan pelatihan usaha ini sejak tahun 2022. Jenis kegiatan pelatihan usaha yang dilakukan berupa pelatihan pembuatan tas mini, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan akrilik, pelatihan tata rias wajah, dan pelatihan salon. Kelurahan Titi Rantai memiliki UMKM berupa keripik, roti bohong, minyak urut, popcorn, sambal cakalang,

rempeyek ubi dan pisang. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM di kelurahan Titi rantai berdampak pada masyarakat yang membutuhkan suatu usaha dan mengembangkan UMKM nya, serta dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti meningkatkan produk dan jasa, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran, hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai UMKM agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang telah membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat peran UMKM di sektor ekonomi yang memiliki andil cukup besar utamanya yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia³.

Pemasaran UMKM kelurahan Titi Rantai di pasarkan secara online yaitu dengan bekerja sama dengan pemko Medan di Kedai Elektronik Medan (KEDAN). Serta dipamerkan pada tingkat kecamatan dan acara-acara pemko Medan. Hal ini termasuk dari bagian pengembangan produk UMKM kelurahan. Tujuannya dapat memajukan dan mengenalkan UMKM kelurahan Titi Rantai keluar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 37 tahun 2019 di Kelurahan Titi Rantai. Fokusnya termasuk bagaimana kelurahan Titi Rantai mengelola kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM terhadap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan membutuhkan suatu keterampilan usaha.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kemiskinan dapat menghambat program pembangunan. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui program peningkatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi tolok ukur

³ Hasan Ismail “Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.06 No.01, Tahun 2022

keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Program ini menjadi hal yang harus segera dilaksanakan, dengan meningkatnya perekonomian maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Salah satu program yang dilakukan dalam percepatan peningkatan ekonomi adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat⁴.

Permasalahan kemiskinan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa/Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005⁵.

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

⁴ Moris Adidi dkk. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan" Jurnal Sosio Konsepsia Vol.9, No.03 Mei-Juni 2020

⁵ Moris Adidi dkk. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan" Jurnal Sosio Konsepsia Vol.9, No.03 Mei-Juni 2020

Berlandaskan pada permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Studi (Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan khususnya pada kegiatan pelatihan usaha dan pengembangan UMKM di kelurahan ?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dipergunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut terarah dan memudahkan dalam pembahasan agar tujuan penelitian tercapai. Penelitian ini akan difokuskan bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Khususnya pada Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan pelatihan usaha dan pengembangan UMKM kelurahan.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 di Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Pemberdayaan masyarakat dan Implementasi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta meningkatkan kemampuan analisis penulis

b. Bagi Kelurahan Titi Rantai

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam membuat dan menyempurnakan program UMKM khususnya pada kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru

c. Bagi Civitas Akademika Fisip Uisu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, mengenai kinerja aparatur sipil negara dan menjadi acuan pada penelitian selanjutnya

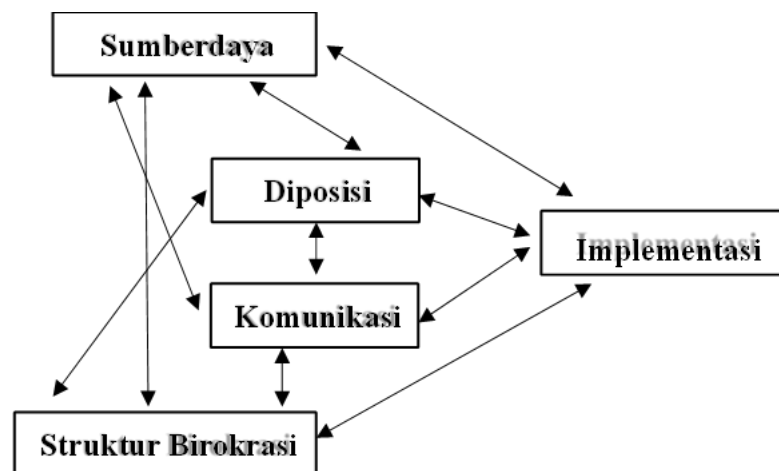
BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Teori Penelitian

2.1.1. Implementasi

Menurut teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik⁶. Dalam pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.



Gambar 1 Konsep George Edward III

⁶ Dwi Nurani. "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan." FISIP UI 2009

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran⁷.

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

1. *Transmisi*

Transmisi, yaitu berkaitan dengan penyampaian informasi diantara sesama implementor menyangkut pemahaman para pelaksana akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman tentang keputusan yang dikeluarkan.

2. *Konsistensi*

Konsistensi, yaitu berkaitan dengan kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. Artinya bahwa perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga tidak membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh berubah-

⁷ DRS.AG.SUBARSONO, M.Si.,MA “*Analisis Kebijakan Publik*”(Yogyakarta:2005), hal.90

ubah). Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari suatu implementasi kebijakan.

3. Kejelasan

Kejelasan, yaitu berkaitan dengan kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal dalam implementasi di lapangan.⁸

Berkaitan dengan hal di atas, bahwa pentingnya memahami komunikasi dalam organisasi, karena ia merupakan salah satu unsur dari organisasi (Pace & Faules, 2000:24). Karena ia merupakan salah satu unsur dari organisasi, maka ia merupakan salah satu penunjang utama dalam keberhasilan mencapai tujuannya. Dalam hal ini, komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam birokrasi sebagai pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan.

⁸ Hj.Rulinawaty Kasmad, S.Sos.M.Si “*Studi Implementasi Kebijakan*” (Makassar: Kedai Aksara,2013)

Wewenang berkaitan dengan besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. Oleh karena itu wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program lainnya. Seseorang dapat saja memiliki wewenang yang luas tetapi tidak cukup efektif dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga perlu kerjasama antara para pejabat maupun pelaksana di lapangan. Wewenang hadir dapat dilihat dari penyediaan fasilitas, memberi bantuan, sampai memaksakan perilaku. Kewenangan ini harus bersifat formal karena merupakan otoritas atau legitimasi untuk melaksanakan tugas.

Informasi merupakan suatu hal penting dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Artinya para pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya, dan data tentang ketaatan para pelaksana terhadap peraturan pemerintah. Kedua bentuk informasi tersebut penting bagi efisiensi dan kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing. Fasilitas-fasilitas dimaksudkan disini menyangkut ketersediaan sarana fisik yang mendukung terlaksananya suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan adalah kecukupan sumber dayayang dimiliki oleh organisasi pelaksana kebijakan. Di antara sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting karena sumber daya yang lainnya dapat diadakan sesuai dengan kemampuan dimilikinya. Namun, sumber daya manusia pengadaannya melalui proses yang kompleks ketimbang yang lainnya.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya.

Disamping itu para pelaksana harus memahami/mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk itu ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi ini yaitu: pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan, dan insentif.

Sebagai organisasi pelaksana kebijakan, maka ia perlu memiliki aparat yang memiliki sikap terhadap pekerjaannya dan sikap terhadap organisasi, agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Aparat yang memiliki sikap-sikap yang seperti itu perlu dimiliki birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik, sehingga kualitas layanan publik dapat tercapai.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur.

Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOPs) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari

luar (eksternal) organisasi. Tanggungjawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, akan tetapi sering masing-masing organisasi mempertahankan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

Disamping itu berbagai kelompok kepentingan juga (Partai Politik, LSM,) mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Dalam organisasi, struktur dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, kalau struktur tersebut tidak disesuaikan tugas-tugas organisasi. Demikian juga, organisasi tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya kalau strukturnya tidak fleksibel terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Dengan demikian, tidak ada satu struktur yang terbaik untuk semua organisasi. Namun, struktur yang terbaik adalah struktur yang dapat membantu atau mendorong organisasi merealisasikan strateginya (Galbraith et. al., 2002: 60).⁹

⁹ Hj.Rulinawaty Kasmad, S.Sos.M.Si “*Studi Implementasi Kebijakan*” (Makassar: Kedai Aksara,2013)

2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan (people-centered development) mulai dari tahap identifikasi, perumusan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian (Sulistiyono, 2010:50). Pemberdayaan masyarakat juga menjadi saran Osbe menjadi saran Osbone dan Gebler (1991:57) sebagai suatu prinsip dalam reinventing government, yaitu "pemerintahan milik masyarakat: memberi kewenangan ketimbang melayani." Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Sumaryadi (2005:99), mengandung dua pengertian, yakni: To give power or authority to dan To give ability to or to enable.

Disamping itu, ada pula yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Di sini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek saja.

Craig dan Mayo (1995) juga menyatakan bahwa pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Hikmat, 2006:4).

Sedangkan Shardlow (1998:32) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka ("such a definition of empowerment is centrally about people taking control of their own lives and having the power to shape their own future").

Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) yang dikenal dengan bidang pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nama 'Self-Determination', yang dikenal sebagai salah satu prinsip dasar dalam bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Adi, 2003:53-54).

Pada dasarnya, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1996).

Lebih lanjut, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan budaya tertentu. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat berkembang. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi.

Diantara strategi tersebut adalah modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat setempat. Prioritas utama program pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian, yang artinya masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya (Setiani, 2005:5-6).

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat ditinjau dari Potensi Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini Setiani (2005:7-9) mengemukakan bahwa dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini di dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dahulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung¹⁰.

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2006). Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali terhambat oleh karena pemerintah tidak mengetahui untuk siapa, apa pendekatan yang sesuai, dan bagaimana caranya program pembangunan tersebut dilaksanakan. Program pembangunan yang terpusat pada pemerintah seringkali mencapai tujuannya secara makro namun pada hakikatnya komunitas yang berada di tingkat mikro tidak mendapat pengaruh ataupun tidak dijangkau oleh pembangunan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat pada intinya berusaha bagaimana individu, kelompok yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Adi (2008). Menurut Sumodiningrat (1997) pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang senyawa dan

¹⁰ Muhammad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. "*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*"(Yogyakarta: Gava Media, 2021) hal.27

unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan serta membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini mengkaji informasi dan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, dengan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dari penelitian tersebut.

Pertama, penelitian oleh Moris Adidi Yogya dan Dia Meirina Suri, dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan menggunakan metode penelitian eksploratif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum terlaksana secara keseluruhan karna belum mengimplementasikan dengan baik karna disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola dalam memahami tugas dan tanggung jawab.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pembahasan yaitu membahas program ekonomi kelurahan dalam memberi peminjaman dana untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dengan mengambil tiga sampel kelurahan yang berbeda di dalam satu kota. Persamaan terletak pada membahas implementasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dalam mengembangkan usaha.

Kedua, penelitian oleh ferry Duwi Kurniawan, dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penanggulangan Kemiskinan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimal bantuan pemerintah dalam pengembangan UMKM.¹² Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada faktor penghambat dan kendala yang berbeda serta penelitian ini tidak mengacu pada peraturan pemerintah tertentu. Persamaan terletak pada pemberdayaan dan mengembangkan UMKM masyarakat.

¹¹ Moris Adidi Yogya, Dia Meirina Suri Jurnal Sosia Konsepsia : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan(2020) vol 9,hml 247

¹² Ferry Duwi Kurniawan Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penanggulangan Kemiskinan(2014) vol 2,hml 165

Ketiga, penelitian oleh Elok Wahyuningsih, Achluddin Ibnu Rochim dan M.Kendry Widiyanto, dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S.Grindle. Hasil penelitian ini telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan baik dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam mengurus izin usaha mereka dan masyarakat pelaku UMKM serta pemerintah mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.¹³Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada pembahasan yang membahas pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan UMKM dalam memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memudahkan izin usaha dan teori implementasi kebijakan yang digunakan. Persamaan terletak pada pembahasan implementasi pemberdayaan dan UMKM serta ruang lingkup wilayah yaitu kelurahan.

Keempat, penelitian oleh Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimal dan adanya kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan karena diukur berdasarkan teori Merilee S.Grindle.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus masalah yang dibahas yaitu pengentasan kemiskinan dengan membuat program sebagai upayanya dan teori implementasi kebijakan yang digunakan. Persamaan terletak pada pembahasan implementasi pemberdayaan dan UMKM.

Kelima, penelitian oleh Hasan Ismail, dengan judul Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan dan keterlibatan stakeholder serta sikap pelaksana yang antusias dalam pengimplementasian kebijakan pemberdayaan UMKM.¹⁵Perbedaan dengan

¹³ Elok Wahyuningsih, Achluddin Ibnu Rochim, M.Kendry Widiyanto Jurnal Penelitian Administrasi Publik : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya(2023) vol 3,hml 228

¹⁴ Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, Calvin Edo Wahyudi Jurnal Syntax Idea : Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo(2020) vol 2,hml 26

¹⁵ Hasan Ismail Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara : Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro(2022),hml 143

penelitian saya terletak pada pengembangan UMKM berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak dan pada ruang lingkup kewilayahannya yaitu kabupaten. Persamaan terletak pada pembahasan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan UMKM dan menggunakan teori implementasi kebijakan yang sama.

Keenam, penelitian oleh Ryan Gymnastiar Alwin, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sudah berjalan dengan prosedur dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Tingkat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan memberikan pelayanan komprehensif kepada masyarakat, terutama UMKM yang telah memiliki izin usaha. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Lakarsantri di Kota Surabaya melibatkan penjelasan mengenai NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada para pelaku UMKM. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan dalam proses pengurusan izin usaha, termasuk pemberian kode usaha sebagai bentuk legalitas kegiatan usaha.¹⁶ Perbedaan pada penelitian saya terletak pada fokus permasalahan, yang memberdayakan UMKM melalui pengurusan legalitas usaha serta teori implementasi kebijakan yang digunakan. Persamaan nya terletak membahas pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan UMKM di kelurahan.

Ketujuh, Penelitian oleh Yahya Antu, Elnino Husain Mohi, Rukiah Nggilu, I Kadek Satria Arsana, Fadly Binolombangan, Non Endey, dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bagi sektor ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19 sangat memukul bagi pelaku UMKM dan diperlukannya peran pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian pelaku UMKM dapat pulih

¹⁶ Ryan Gymnastiar Alwin Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara : Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya(2023) Vol 1, hml 83-93

kembali.¹⁷Perbedaan dengan penelitian saya terletak fokus masalah yang dibahas, dalam penelitian ini fokus ke menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah Gorontalo dan dampaknya terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid 19. Persamaan terletak sama-sama membahas tentang mengembangkan UMKM dan menggunakan teori implementasi kebijakan yang sama.

Kedelapan, Penelitian oleh Kinanti Resmi Hayati, Izzatun Nisak, Amalia Tasya Salsabila Suyanto, Mahesa Aginio Bimantio, dengan judul Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan UMKM menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kelurahan Kebonsari sudah cukup berperan aktif dari memberi dukungan dan mengembangkan UMKM yang ada di Kebonsari.¹⁸Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada hasil yang pada penelitian ini tidak menggunakan teori implementasi kebijakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kebijakan. Persamaan terletak pada pembahasan yang membahas tentang mengembangkan UMKM di kelurahan.

Kesembilan, Penelitian oleh Muhammad Alhada Fuadilah Habib dengan judul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁹Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini lebih mengarah ke ekonomi kreatif yang menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penelitian ini lebih mengarah ke kajian bukan implementasi. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada pembahasan pemberdayaan ekonomi masyarakat nya.

¹⁷Yahya Antu, Elnino Husain Mohi, Rukiah Nggilu, I Kadek Satria Arsana, Fadly Binolombangan, Non Endey Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia : Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo

¹⁸ Kinanti Resmi Hayati, Izzatun Nisak, Amalia Tasya Salsabila Suyanto, Mahesa Aginio Bimantio Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik : Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan UMKM

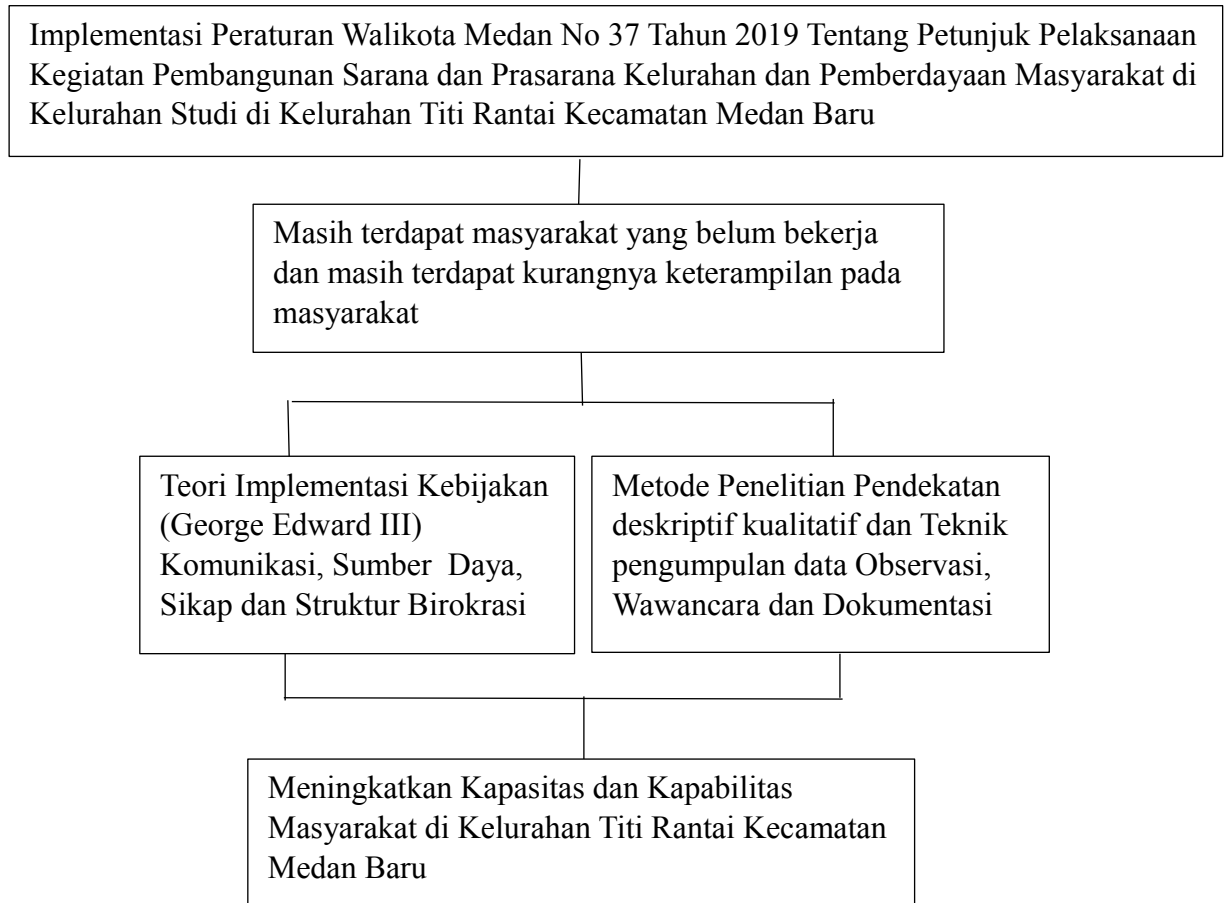
¹⁹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy : Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif

Kesepuluh, Penelitian oleh Lidya Britania Putong, Calvin Edo Wahyudi dengan judul Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa standar kebijakan dan sasaran kebijakan kurang terimplementasi. Standar kebijakan tidak ada, sumber daya yang kurang terimplementasi dan dana dalam program ini masih kekurangan.²⁰Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus yang diteliti. Pada penelitian ini lebih kedalam bantuan tunai. Persamaan dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang implementasi terkait UMKM untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat.

²⁰ Lidya Britania Putong, Calvin Edo Wahyudi judul Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM Jurnal Kebijakan Publik : Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada UMKM

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur atau pola berpikir peneliti untuk mempermudah dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas maka dapat dilihat Peraturan Walikota Medan No 37 Tahun 2019 pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan khususnya pengelolaan kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan. Peraturan ini dibuat untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan karena masih terdapat masyarakat yang tidak bekerja dan tidak terampil untuk membuka suatu usaha. Untuk menyelesaikan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang memiliki empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Selain itu peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah keterampilan masyarakat